



BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : B-6.20/SESMA-BIG/KP.03.01/5/2021**

**TENTANG**

**PENILAIAN DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN**

Kepada Yth.  
(daftar terlampir)

Dalam rangka penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) periode I Tahun 2021 untuk pembinaan karir Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, maka kepada seluruh Pejabat Fungsional dan Calon Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi terlampir dapat mengajukan DUPAK dengan ketentuan :

1. Kegiatan yang dapat dikumpulkan adalah kegiatan yang belum pernah diajukan sebelumnya, dan sekurang-kurangnya sampai dengan bulan **Juni 2021**.
2. DUPAK ditandatangani oleh pejabat pengusul (Pejabat Eselon II di Unit Kerja masing-masing).
3. DUPAK diajukan dengan melampirkan :
  - Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan
    - Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan yang telah ditandatangani oleh atasan langsung
    - Salinan SK Jabatan terakhir dan salinan SK Kenaikan Pangkat terakhir, dan salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir
    - Lampiran/ bukti fisik DUPAK
  - Calon Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan
    - Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan yang telah ditandatangani oleh atasan langsung
    - Salinan SK CPNS, salinan SK PNS, dan salinan SKP terakhir
    - Lampiran/ bukti fisik DUPAK
4. Untuk pejabat fungsional yang sudah mencapai jabatan tertinggi dalam jenjang jabatannya (***maintenance***), pengajuan DUPAK ***maintenance*** mengikuti aturan yang berlaku.
5. DUPAK beserta lampirannya disampaikan kepada Sekretariat Tim Penilai Pusat (Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial) Badan Informasi Geospasial paling lambat tanggal **30 Juni 2021**.

Dikeluarkan di Cibinong,  
Pada tanggal 6 Mei 2021

Sekretaris Utama,

*ditandatangani secara elektronik*

Muhtadi Ganda Sutrisna

Lampiran Surat

Nomor : B-6.20/SESMA-BIG/KP.03.01/5/2021

Tanggal : 6 Mei 2021

**Pejabat Fungsional dan Calon Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan pada:**

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Kementerian Perhubungan
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
9. Pemerintah Daerah D. I. Yogyakarta
10. Pemerintah Provinsi Bali
11. Pemerintah Provinsi Banten
12. Pemerintah Provinsi Bengkulu
13. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
14. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
15. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
16. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
17. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
19. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
20. Pemerintah Provinsi Maluku
21. Pemerintah Provinsi Papua
22. Pemerintah Provinsi Papua Barat
23. Pemerintah Provinsi Riau
24. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
25. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
26. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
27. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
28. Pemerintah Kota Bekasi
29. Pemerintah Kota Bogor
30. Pemerintah Kota Cirebon
31. Pemerintah Kota Jayapura
32. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
33. Pemerintah Kota Magelang
34. Pemerintah Kota Malang
35. Pemerintah Kota Sawah Lunto
36. Pemerintah Kota Semarang
37. Pemerintah Kota Serang
38. Pemerintah Kota Tangerang
39. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
40. Pemerintah Kab. Aceh Jaya
41. Pemerintah Kab. Bandung

42. Pemerintah Kab. Banjar
43. Pemerintah Kab. Bangka Barat
44. Pemerintah Kab. Bangka Selatan
45. Pemerintah Kab. Bangka Tengah
46. Pemerintah Kab. Barito Selatan
47. Pemerintah Kab. Belitung
48. Pemerintah Kab. Bekasi
49. Pemerintah Kab. Bengkalis
50. Pemerintah Kab. Bintan
51. Pemerintah Kab. Blitar
52. Pemerintah Kab. Bondowoso
53. Pemerintah Kab. Buton
54. Pemerintah Kab. Buton Utara
55. Pemerintah Kab. Empat Lawang
56. Pemerintah Kab. Jayapura
57. Pemerintah Kab. Jeneponto
58. Pemerintah Kab. Jepara
59. Pemerintah Kab. Kaur
60. Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
61. Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
62. Pemerintah Kab. Kubu Raya
63. Pemerintah Kab. Kulon Progo
64. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
65. Pemerintah Kab. Lamandau
66. Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota
67. Pemerintah Kab. Lombok Utara
68. Pemerintah Kab. Magelang
69. Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
70. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
71. Pemerintah Kab. Merangin
72. Pemerintah Kab. Ogan Ilir
73. Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
74. Pemerintah Kab. Pasaman Barat
75. Pemerintah Kab. Pelalawan
76. Pemerintah Kab. Pematang
77. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
78. Pemerintah Kab. Pulau Morotai
79. Pemerintah Kab. Sampang
80. Pemerintah Kab. Sanggau
81. Pemerintah Kab. Serang
82. Pemerintah Kab. Sintang
83. Pemerintah Kab. Supiori
84. Pemerintah Kab. Tabalong
85. Pemerintah Kab. Tangerang
86. Pemerintah Kab. Tuban
87. Pemerintah Kab. Waropen